



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 007 / II / SK-SMP / BPMPPT / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
“ BRIGHTEN HIGH SCHOOL ”
DESA PUSAKA RAKYAT , KECAMATAN TARUMAJAYA
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Cendikia Bangsa Berakhlak di Kota Harapan Indah Blok RV 2 No.10 Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) BRIGHTEN HIGH SCHOOL ;
- c. bahwa Yayasan Bina Cendikia Bangsa telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) BRIGHTEN HIGH SCHOOL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;



9. Peraturan Gubernur Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pempipaan Sebagian Kewenangan untuk Mengangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi

Memperhatikan : 1. Akta Notaris LINDA HAPSA RI YUWONO, S.H.
 Tanggal : 08 MEI 2006
 Nomor : 11

- Tentang pendirian Yayasan BINA CENDIKIA BANGSA
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

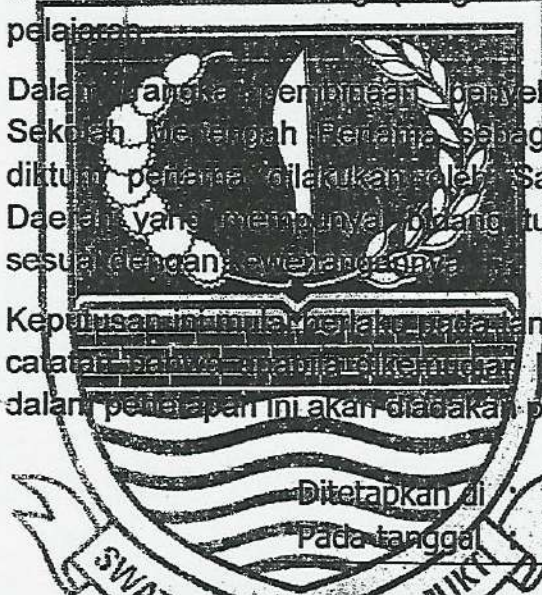
Nama Yayasan : Yayasan BINA CENDIKIA BANGSA
 Alamat : Kota Harapan Indah Blok RV 2 No.10
 Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan
 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMP BRIGHTEN HIGH SCHOOL
Alamat : Kota Harapan Indah Blok RV 2 No.10
Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pemberian penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 16 FEB 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**



Dr. H. EDI SUPRIADI, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.